

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini semakin memudahkan pekerjaan manusia, sebagai contoh sederhana saat ini sudah tersedia sistem antrian berbasis website atau Aplikasi di berbagai sektor pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Penyelenggaraan pelayan publik yang prima, sehingga dapat memudahkan rakyat untuk memperoleh pelayanan yang baik.

E-government, adalah salah satu bentuk peningkatan pelayanan pemerintah terhadap pelayanan di masyarakat. *E-government* merupakan penggunaan internet sebagai media untuk pelayanan agar pelayanan semakin cepat dan maksimal serta efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui pelayanan ini pemerintah dapat meningkatkan interaksi bisnis, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan kebebasan akses informasi bagi individu (Khansari, et al 2016).

Pelayanan publik melalui website dikelola secara aktif oleh Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bentuk transparansi atas informasi dan pelayanan publik yang merupakan hak bagi seluruh rakyat. Dengan adanya system ini maka dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah dimata masyarakat juga peningkatan efektivitas dari pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini akan menjadi salah satu program nasional menyambut era 4.0 yang saat ini rasakan.

Menurut pengamatan yang telah penulis lakukan, hampir sebagian besar daerah di Indonesia saling berlomba untuk memajukan potensi daerahnya serta memunculkan banyak sekali inovasi baru, tidak terkecuali pada sektor teknologi digital. *Smart City* adalah konsep yang ditawarkan untuk menjawab tantangan global terkait dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. *Smart City* merupakan sebuah konsep tentang tata kelola kota yang cerdas yang dapat memudahkan masyarakat dalam

mendapatkan informasi serta pelayanan secara cepat, Smart City tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga tuntutan lokal, akan tetapi juga menjawab tantangan baru bagi perkembangan pelayanan publik melalui *E-Government* seperti integrasi pelayanan masyarakat dan juga transformasi kota.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang menggiatkan gerakan *Smart City* hal ini telah di buktikan dengan proses pelayanan publik berupa informasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Informasi terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini sudah bisa di akses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jember, kini pemerintah kabupaten jember mulai berinovasi pada sektor pendapatan daerah melalui retribusi, berdasarkan berita yang telah di muat oleh Radio Republik Indonesia (RRI) media di tahun 2017 telah di luncurkan *E-Retribusi* yang merupakan salah satu upaya implementasi *Smart City*. Dengan adanya E-Retribusi ini Pemerintah Kabupaten berharap agar dapat meningkatkan efektifitas dari pembayaran retribusi daerah, mengurangi angka korupsi yang marak di kalangan oknum pemerintahan.

Dalam usaha peningkatan keamanan serta kemudahan bertransaksi pemerintah Kabupaten Jember telah bekerja sama dengan pihak Bank BTN untuk penerbitan Kartu Elektronik atau *e-money* yang akan digunakan sebagai media transaksi dalam pembayaran retribusi daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan baru ini di harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan uang non tunai. Pihak Pemerintah Kabupaten Jember juga melakukan ini sebagai salah satu bentuk Kontrol sosial dalam hal penanaman modal atau bantuan dana pelatihan bagi pengusaha mikro dan pedagang pasar.

Pembayaran retribusi pelayanan pasar, kebersihan secara elektronik ini bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan dan pembayaran di Kabupaten Jember Retribusi pasar menjadi salah satu komponen dari retribusi daerah, dimana retribusi daerah itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel 1.1Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember 2018

No.	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		
		Target	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	185.222.247.938.00	182.682.475.898.17	98,63
2.	Retribusi Daerah	33.293.275.775.00	37.989.490.704.04	114,05
3.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.593.329.187.50	5.533.329.187.50	98,93
4.	Lain-Lain PAD yang sah	385.195.965.710.00	371.324.092.233.06	98,40

(Sumber : www.jemberkab.go.id)

Berdasarkan pada data tabel diatas besar nilai retribusi bagi pendapatan asli daerah menunjukkan angka yang cukup besar. Harapannya dengan besarnya pemasukan dari retribusi baik dari pasar, maupun objek lainnya akan memberikan manfaat besar terhadap peningkatan sarana prasarana serta fasilitas sosial di Kabupaten Jember.

Dengan adanya kebijakan e-retribusi dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pembayaran retribusi pasar dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, karena pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai, sehingga petugas juga tidak direpotkan dengan uang recehan. Petugas penarik retribusi, yang awalnya membutuhkan lima orang petugas kini cukup tiga petugas. Kebijakan e-retribusi pasar ini juga dapat meminimalisir adanya kebocoran keuangan, hal ini dikarenakan sifatnya yang dapat diakses oleh semua orang, sehingga pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui banyaknya jumlah retribusi pasar yang masuk tiap harinya.

Kebijakan e-retribusi pasar akan diberlakukan diseluruh pasar tradisional Kabupaten Jember. Di Jawa Timur, Dalam kebijakan ini, Dinas Perdagangan menjalin kerjasama dengan beberapa bank, yaitu Bank BTN. Kebijakan e-retribusi itu sendiri mulai di uji coba pada bulan April 2019. Tercatat sebanyak tiga pasar telah menerapkan kebijakan e-retribusi, antara lain Pasar Patrang, Pasar Mangli dan Pasar Umbul Sari. Saat melakukan penelitian lebih lanjut peneliti menanyakan mengapa memilih tiga

pasar tersebut, jawaban dari narasumber adalah karena pasar tersebut merupakan pasar pertama menurut sejarah pasar di kabupaten jember. Kemudian alasan peneliti melakukan penelitian di pasar patrang adalah, secara evaluasi implementasi kebijakan E-Retribusi ini adalah pasar yang menjalankan proses sejak di luncurkan kebijakan tersebut hingga saat laporan ini di tulis, sedangkan untuk di dua pasar yakni Pasar Mangli dan Pasar Umbulsari belum optimal dikarenakan banyak faktor seperti sumberdaya teknologi yang terkendala dan untuk di Pasar Umbulsari baru di realisasi pertengahan Februari 2020.

Kebijakan e-retribusi yang dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan *E-Retribusi* di pasar tradisional tentu saja memiliki banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pasar Patrang merupakan salah satu pasar yang di tunjuk sebagai pasar yang melaksanakan kebijakan penarikan retribusi menggunakan kartu elektronik (*E-Money*). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting mengingat juga menyangkut pada siklus kebijakan yang mendapat perhatian lebih dari aktor-aktor publik, oleh sebab itu penulis ingin melakukan riset lebih dalam mengenai kebijakan *e-retribusi* tersebut dengan judul **“Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimanakah implementasi kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana proses imlementasi kebijakan E- Retribusi Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses implementasi kebijakan e- retribusi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan terkait dengan kebijakan pemerintah, serta diharapkan dapat menambah masukan dari saran-saran untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan E-Retribusi di pasar Patrang yang lain di Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan bidang kajian Implementasi Kebijakan bagaimana pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta strategi dalam pelaksanaan kebijakan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian. Di bawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji.